

OPTIMALISASI AKTIVITAS KOMUNIKASI
DI DALAM MIMBAR AKADEMIK
UNTUK MEMBANGUN SUASANA AKADEMIK YANG SEHAT

Yulius Pribadi

Abstract

There is a close link between academic atmosphere and academic speech. Academic atmosphere should be managed to cultivate corporate vision and mission in order to develop the organization itself and students as agents spreading out the trusted notion. Corporate founder had realized that all institution activities have to cascade to their vision and mission. Academic speech as a communication activity can be used to optimize this objective. Through planned communication activity, corporate leader is able to utilize it to persuade his comrade, companion, and all counterpart to develop their institution. This paper is collaborated from many areas such as academic freedom theory, newspaper, and observation.

Keywords: Academic atmosphere, academic speech, planned communication

A. Pendahuluan

Tokoh-tokoh yang disegani di bidangnya diundang dan dijamu dalam acara makan siang di istana kepresidenan hari Kamis, 4 Juni 2015. Berita yang disampaikan *Kompas* (Jumat, 5 Juni 2015) ini menjadi bukti bahwa orang-orang yang bertekun dan serius di bidangnya itu sedikit banyak dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi lingkungan di sekitarnya. Mimbar akademik merupakan salah satu wahana yang dapat dijadikan tempat untuk menempa dan juga melatih keseriusan sivitas akademika. Para anggota sivitas akademika dituntut untuk bertekun dan fokus pada bidangnya supaya dapat saling menyampaikan ide dan gagasannya serta belajar satu dengan yang lain guna mencari kebenaran ilmiah (*scientific truth*) melalui penalaran (*reasoning*).

Pengelolaan mimbar akademik dapat dilakukan melalui forum pertukaran pandangan seperti simposium, seminar, diskusi panel, dengan aturannya masing-masing. Mimbar

akademik ini berbeda dengan mimbar bebas yang dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Mimbar akademik memiliki aturan yang jelas mengenai relasi di antara sesama warga sivitas akademika yang terlibat dalam aktivitas komunikasi tersebut.

Komunikasi yang dijalankan dalam *discourse* itu sebaiknya selalu mengoptimalkan komunikasi dua arah (*two-way traffic communication*) di antara unsur-unsur yang terlibat. Komunikasi satu arah memang memiliki beberapa keuntungan karena tidak adanya diskusi. Maksud dan tujuan pembicara dapat disampaikan dengan lancar dan tidak ada gangguan/ interupsi.

Komunikasi dua arah (*two-way traffic communication*) ini akan menjadi efektif apabila diikuti komunikasi banyak arah (*multiple-way traffic communication*). *Marginal man* yang terlibat dalam *discourse* akan melakukan *extention conversation* dengan pihak-pihak lain, sehingga beberapa topik diskusi akan dibahas dengan lebih

mendalam dan memungkinkan diterimanya berbagai pandangan dari berbagai pihak.

Komunikasi dua arah ini memungkinkan diketahuinya *feedback/* umpan balik dari pihak lain dalam diskursus yang dilakukan. Relasi yang jelas dari berbagai pihak yang tergabung dalam sivitas akademika dan disertai etika berdiskusi menjadikan kebebasan mimbar akademik tetap menghidupkan rasa saling-toleransi dalam berbeda pendapat. Diskursus yang terjadi di antara sesama warga sivitas akademika harus mengedepankan keterbukaan terhadap pandangan, pikiran, dan pendapat warga yang lain sehingga akan menghindarkan seseorang dari arogansi akademik dan satu-satunya yang benar dengan mengabaikan kebenaran yang bersumber dari pihak lain.

Dalam sejarahnya, kampus tempat berkumpulnya masyarakat akademis yang dikenal sebagai sivitas akademika itu berawal dari berbagai kegiatan/forum pertukaran pandangan. Kegiatan akademis ini sejak awal selalu melibatkan diri dengan masyarakat luas.

Kegiatan pengembangan pemikiran dan studi yang membahas permasalahan umum (yang perlu dianggap perlu dipahami dan diusahakan penyelesaiannya) diwadahi dalam kegiatan *studium generale*. Kegiatan pembelajaran yang lebih memfokuskan diri pada disiplin ilmu tertentu melalui sistem perkuliahan diwadahi dengan *collegium*.

Diskursus antara pengajar dan murid maupun antara sesama murid inilah yang akan membentuk *academic atmosphere* (suasana akademik) sebagai ciri khas interaksi antara sesama warga sivitas akademika. Simposium, seminar, dan diskusi panel dengan aturannya masing-masing sudah dikelola untuk menyelenggarakan berbagai forum pertukaran

pandangan. Kegiatan studi diawali dengan penyajian *lectiones* (kuliah) di pagi hari oleh para pengajar, dan petang harinya disusul dengan acara *disputationes* (pembahasan) antara para pengajar dan murid-muridnya maupun antara sesama murid. Dari bahan perkuliahan dan pembahasan itu mungkin saja timbul berbagai *quaestiones* (pertanyaan) yang jawabannya perlu ditemukan dan dirumuskan bersama-sama. Dari metode tersebut tergambar bahwa proses pembelajaran pada perguruan tinggi berciri sebagai *discourse/pertukaran* gagasan dengan mendalam yang aktif antara pengajar dan murid maupun antara sesama murid.

Mimbar akademik akan mampu menunjukkan kontribusi dalam pengembangan suasana akademik apabila dapat mempraktekkan kebebasan akademik sebagai hak sivitas akademika. Kebebasan akademik ini harus diikuti oleh kebebasan mimbar akademik bagi warga sivitas akademika, baik para mahasiswa maupun pengajar. Kebebasan akademik yang disertai kebebasan mimbar akademik ini berlaku bagi setiap anggota sivitas akademika untuk melakukan studi, penelitian serta pembelajaran ilmu kepada dan antara sesama warga sivitas akademika. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ini harus menjadi semangat dalam penyelenggaraan berbagai bentuk *discourses/pertukaran* gagasan secara mendalam di antara sesama warga sivitas akademika.

Mimbar akademik ini harus dibedakan dengan membar bebas. Mimbar akademik dan Kebebasan akademik itu merupakan hak bagi sekalangan terbatas di antara para akademisi, yaitu mereka yang diakui memiliki wewenang dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya *ex cathedra academica* (dari

mimbar akademik) mengenai sesuatu yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Mimbar bebas tidak terbatas untuk kalangan tertentu, karena mimbar bebas itu diselenggarakan dalam rangka suatu peristiwa publik. Mimbar bebas dapat berupa demonstrasi, gerakan protes dan sebagainya.

Kegiatan mimbar akademik yang dilakukan terbatas untuk para akademisi ini memang dimaksudkan untuk mendalami suatu permasalahan secara mendalam di antara para anggota sivitas akademika dan mencari solusi yang paling tepat. Kegiatan mimbar akademik ini diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana akademik (*academic atmosphere*) yang sehat. Tentu saja dukungan dari semua elemen kampus sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang dapat berguna secara internal dan juga bagi masyarakat luas. Sebagaimana disebutkan dalam bab kedua, pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kebebasan akademik ini merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

B. Pembahasan

Mimbar akademik itu terjadi di dalam lingkungan organisasi kampus. *“It should be obvious that organizations cannot exist without communication.”* (Keyton, 2005:12). Mimbar akademik merupakan wadah bagi *discourse* demi pengembangan sivitas akademika melalui kegiatan diskusi, seminar, diskusi panel, simposium, dan lain-lain. Kegiatan komunikasi yang terjadi tentu bukan

merupakan proses yang sederhana. *“... organizational communication is a complex and continuous process through which organizational members create, maintain, and change the organization”* (Keyton, 2005:13).

Mimbar Akademik dan Suasana Akademik juga memiliki kompleksitas dalam komunikasi organisasi, seperti yang sudah dipahami bersama bahwa telah terjadi dari awal terbentuknya mimbar akademik tersebut (dari otoritas *ex cathedra* saja menuju *ex cathedra academica*/ dari mimbar akademik – dari paham *faith-over-reason* menuju *juxtaposition*/ posisi kesejajaran). Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat berbagai ancaman terhadap kebebasan mimbar akademik yang dikemukakan oleh Nelson (2010:53-59) berikut: *“Though the current and emerging threats to academic freedom certainly overlap and interact, here is a provisional list:*

1. Instrumentalization.

The notion that higher education is first and foremost job training has blossomed into a broader instrumentalist epistemology that concentrates pedagogy and research alike on narrowly defined goals and outcomes. It poses several interrelated dangers: to faculty’s freedom to teach as they believe they should, to the research that will be supported and rewarded, to definitions of institutional mission, and to the capacity of democratic societies to promote critical citizenship.

2. Contingency.

As I detail in the next chapter, higher education as a whole has doubled its reliance on contingent teachers, from graduate student employees to part-time faculty to full-time faculty hired off the tenure track, over the past thirty years.

They now do more than two-thirds of all college teaching. Since most lack any real job security, they work in fear of losing their jobs. They thus have no protection from students, parents, administrators, politicians, or community members offended by what they say in the classroom or in print.

3. *Authoritarian administration.*

When a single administrator is the problem, the faculty can rise up and demand his or her replacement. That is not a useful tactic when the general culture of the upper administration is at stake, as will be clear in the University of Illinois examples I describe later.

4. *Abuses of the national security state.*

In the aftermath of 9/11, we have seen a whole range of very serious affronts to academic freedom justified on the basis of national security. A few faculty members have been arrested without convincing justification and held in solitary confinement. Federal efforts to prevent communication with foreign scholars are a very specific violation of academic freedom, whereas in other cases academics have simply been drawn like other citizens into the extralegal ambit of the national security state.

5. *Administration restrictions on the use of communication technology.*

As new technologies appear, the effort to secure them as appropriate terrains of academic freedom requires both policy work and political struggle. Administrators in the corporate university often assume that traditional academic freedom does not, for example, apply to email or to college and university websites.

6. *Unwarranted research oversight.*

Set up by federal regulation and intended primarily to protect the health and rights of subjects of medical research, Institutional Review Boards (IRBs) have steadily sought to expand their mission to embrace prior approval of humanities and social science research that involves interviewing or surveying human subjects.

7. *Neoliberal assaults on academic disciplines.*

As the corporate university increasingly adopts the belief that market forces should set academic priorities, disciplines less able to raise outside funds are regularly threatened with downsizing or local elimination. Even faculty with tenure can be vulnerable under those conditions.

8. *Managerial ideology.*

The rise of a separate class of career administrators and the substantial increase in their sheer numbers has helped fuel the belief that faculty are not full partners in the educational enterprise but rather resources to be controlled and managed.

9. *Circumvention of shared governance.*

Shared governance refers to the negotiated agreements and processes that structure the relationship between the legal authority of trustees and the professional expertise of faculty, with primary authority ceded to the faculty in such areas as hiring and curriculum.

10. *Globalization.*

Globalization is a historical, political, and economic process that not only affects higher education but also opens opportunities that can transform its character. As universities seek to market their product in other countries+and now to establish satellite campuses abroad+they

may be tempted to abandon the standards and structures that support academic freedom and shared governance in their home institutions. Tenured and full-time employment with benefits appear to be unnecessary expenses, threats to the revenue stream. International capital frequently sees higher education either as an investment opportunity or as a service industry for international finance.

11. *Opposition to human rights.*

If health care, a living wage, vestment in retirement systems, safe working conditions, and the right for employee groups to bargain collectively are basic human rights, then those universities that deny them have ceased to be admirable or ideal institutions. Many of the values higher education has traditionally promoted, from free inquiry to a commitment to the public good, cannot remain credible if a university adopts the employment policies of a ruthless corporation.

12. *Inadequate grievance procedures.*

Many colleges and universities, including my own, have inadequate or largely nonexistent grievance procedures for faculty. Academic senates do not overall have a good record of handling individual cases of violations of academic freedom.

13. *Religious intolerance.*

Both here and abroad there are colleges and universities so consumed with their sense of doctrinal certainty that they really do not honor an acceptable standard of free inquiry. On the other hand, many high-quality religiously affiliated schools in fact leave most academic disciplines virtually untouched by doctrinal issues.

14. *Political intolerance.*

Political intolerance is also an international phenomenon. In the United States, it has been promoted by the renewed culture wars of the past decade, with the right wing's well-funded special focus on classroom speech and campus life.

15. *Legal threats.*

As I pointed out toward the end of chapter 1, the federal courts are threatening to curtail both academic freedom and shared governance at public institutions. Unless the courts prove willing to carve out a special status for faculty, their current tendency to reinforce the authority of the state in its role as an employer will sweep up the faculty in its wake. This trend could leave faculty speech rights massively undermined.

16. *Claims of financial crisis.*

The 2008–10 recession gave administrators the opportunity to claim that their institutions were in financial crisis whether or not it was true. Their plans often demonstrated that they did not share the same values, priorities, loyalties, goals, and sense of mission as the faculty. Deciding how to deal with either real or imagined financial constraints entails fundamental moral and ethical issues.

Dapat kita perhatikan dari uraian di atas bahwa ancaman terhadap kebebasan mimbar akademik ini begitu kompleks dan saling tumpang-tindih. Pengelolaan mimbar akademik yang disesuaikan dengan situasi kampus diharapkan dapat menjadi *panacea* demi kelancaran transfer ilmu pengetahuan kepada para anak didik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi

dan pengelolaan perguruan tinggi, bab kedua pasal 22 butir pertama menyebutkan bahwa “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi”

Otonomi yang dimiliki oleh pihak kampus itu memberi peluang kepada masing-masing perguruan tinggi untuk mengelola berbagai kegiatan, termasuk mimbar akademik sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki. Hal itu dilakukan dengan maksud supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mahasiswa juga dapat belajar dari sumber belajar/ acuan yang ada maupun dari dosen yang mengampu mata kuliah yang diajarkan. “Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar” (Permen P&K RI no.49 bab pertama, pasal 1, butir ke-10).

Optimalisasi kebebasan mimbar akademik itu dapat diperoleh apabila semua elemen sivitas akademika bersedia untuk menyatukan diri menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama dan mengembangkan visi yang ditentukan para pendiri lembaga tersebut. Anderson (2005:3) menuliskan bahwa: “*Crawford was a product of the Sydney cultural tradition and a member of the Melbourne intellectual elite, a celebrated dichotomy in Australian cultural history. ... He maintained the liberal academic's anxiety about intellectual independence, which was a prevailing characteristic of the Sydney intellectual tradition.*” Bagi lembaga pendidikan tinggi terkemuka, tradisi/budaya perusahaan merupakan sesuatu yang akan selalu menjadi acuan berpikir dan bertindak bersama. Tradisi akademik ini yang akan

mengikat para alumni. Tradisi akademik ini yang akan menjadi sesuatu yang akan dibanggakan para peserta didik dan para alumni.

Tradisi akademik ini lahir dan ber-sumber kepada visi dan misi suatu lembaga tersebut. Kebebasan mimbar akademik diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat keyakinan mengenai visi dan misi yang sudah ditetapkan dan juga untuk mentranfer kepada para penerusnya. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa kebebasan akademik itu tidak dapat dilepas-kan dari kebebasan menyampaikan pendapat. “*There is clearly a close link between freedom of speech (or expression) and academic fredom*” (Barent , 2010: 17).

Komunikasi yang terencana dalam mengelola mimbar akademik ini dapat selalu diawali dari menemukan dasar-dasar permasalahan yang sedang terjadi. Teori public relations sebagai bagian dari ilmu komunikasi menekankan pada *fact finding process*. Cutlip, Center & Broom (1994:316-317) menuliskan bahwa:

“In it's most advanced form, public relations is a scientifically managed part of an organization's problem-solving and change processes. Practitioners of this type of public relations use theory and the best available evidence in a four-step problem-solving process:

1. *Defining the problem (or opportunity). This first step involves probing and monitoring knowledge, opinions, attitudes, and behaviors of those concerned with and affected by the acts and policies of an organization. In essence, this is an organization's intelligence function.*

2. *Planning and programming. Information gathered in the first step is used to make decisions about program publics, objectives, action and communication strategies, tactics, and goals. This involves factoring the findings from the first step into the policies and programs of the organization.*
3. *Taking action and communicating. The third step involves implementing the program of action and communication designed to achieve the specific objectives for each of the publics to accomplish the program goal.*
4. *Evaluating the program. The final step in the process involves assessing the preparation, implementation, and results of the program.*"

Defining the problem (or opportunity) menekankan pada penemuan masalah yang sedang terjadi. Permasalahan institusi dari lembaga pendidikan secara umum dan permasalahan suasana akademik harus dilihat dengan seksama mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. *Fact finding process* ini dapat menghindarkan lembaga menjadi salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah yang dihadapi. Penemuan masalah yang tepat akan menuntun pada langkah perencanaan yang tepat pula.

Langkah kedua adalah *planning and programming*. Perencanaan dalam kegiatan komunikasi ini menjadi langkah yang kedua, berbeda dari langkah manajemen yang umumnya bahwa perencanaan selalu menjadi langkah yang pertama. Setelah menentukan dan memastikan permasalahan apa yang sedang terjadi, maka langkah ini menentukan apa yang harus diubah dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah itu maka langkah

selanjutnya adalah mengambil tindakan. Ciri khas dari langkah komunikasi terencana/*planned communication activity* adalah digabungkannya penentuan kegiatan dan aktivitas komunikasi dalam satu tahap kegiatan. Lembaga menentukan siapa yang akan menyampaikan berbagai hal penting dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Penting juga untuk dipahami adalah penentuan waktu, tempat, dan bagaimana penyampaian informasi dilakukan.

Evaluasi dari langkah manajemen komunikasi di atas terus dilakukan tidak hanya di akhir dari pelaksanaan program komunikasi tersebut. Dari perencanaan, evaluasi sudah harus dilakukan untuk melihat apakah perencanaan dilakukan dengan prosedur yang tepat. Evaluasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan program komunikasi tersebut; apakah ada penyesuaian yang dilakukan atau sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Program komunikasi ini juga melihat hasil yang telah dicapai. Semua hasil evaluasi ini menjadi modal data awal untuk kembali melakukan langkah yang pertama dan seterusnya.

Senada dengan pandangan Cutlip dkk tersebut, Smith, Berry, dan Pulford juga memandang langkah *fact finding* sebelum merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Smith, Berry, dan Pulford (2000:67) menawarkan *SOSTAC planning system*. *SOSTAC planning system* itu merupakan kepanjangan dari *situation, objective, strategy, tactics, actions, dan control*. Langkah pertama, penentuan *situation* menjawab pertanyaan *where are we now*. Langkah kedua, penentuan *objectives* menjawab pertanyaan *where do we want to be*. Langkah ketiga, penentuan *strategy* menjawab pertanyaan *how we are going to get there*. Langkah keempat,

penentuan *tactics* menentukan dan menjabarkan *the details of strategy*. Langkah kelima, penentuan *action* menjabarkan dan mengimplementasikan/*putting the plans to work*. Langkah keenam, penentuan *control* ini mengukur, memonitor, mereview, meng-update, dan memodifikasi sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung.

C. Penutup

Kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam aktivitas mimbar akademik itu dapat dioptimalkan dengan memberi perhatian pada komunikasi dua arah. Jenis komunikasi ini dapat digabungkan dengan komunikasi satu arah dan komunikasi banyak arah untuk meyakinkan ide-ide yang disampaikan dalam

mimbar akademik dapat diterima dan dibahas lebih mendalam oleh seluruh sivitas akademika di suatu kampus. Jenis-jenis komunikasi tersebut diintegrasikan dalam komunikasi terencana/*planned communication* untuk menemukan dasar permasalahan yang sedang terjadi sehingga dapat dilakukan langkah penyelesaian masalah dengan tepat. Mimbar akademik ini juga menjadi wahana untuk mengikat pihak internal dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dan terus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Di samping itu, mimbar akademik juga dapat menjadi wahana untuk menyemai nilai-nilai institusi kepada para peserta didik yang diharapkan dapat menjadi agen perguruan tinggi di tempat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Barendt, Eric. *Academic Freedom and the Law – A Comparative Study*. United Kingdom: Hart Publishing Ltd, 2010
- Nelson, Cary. *No University Is an Island*. USA: New York University Press, 2010
- Anderson, Fay. *An Historian's Life – Max Crawford and the Politics of Academic Freedom*. Australia: Melbourne University Press, 2005
- Keyton, Joann. *Communication & Organizational Culture: A Key to Understanding Work Experiences*. USA: Sage Publications Inc, 2005
- Cutlip, Scott M; Center, Allen H; and Broom, Glen M Ph.D. *Effective Public Relations*. USA: Prentice-Hall International, Inc, 1994.
- Smith, Paul; Berry, Chris; and Pulford, Alan. *Strategic Marketing Communications – New Ways to Build and Integrate Communications*. UK: Kogan Page Limited, 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Kompas, Jumat, 5 Juni 2015